U. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	**2**	**3**
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. 4. *Data base* penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
	3. Pengembangan Desa	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan batas desa. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa.
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1. Penetapan pedoman peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan, dan pendidikan bagi anggota BPD. 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi BPD. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD.
	5. Keuangan dan Aset Desa	1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa. 3. Pembinaan, pengawasan, dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa.

1	2	3
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan, dan pendidikan bagi pemerintah desa. 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
	2. Pemantapan Data Profil Desa	1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa. 2. Pelaksanaan pegolahan data profil desa. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengolahan data profil desa.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.
	4. Pelatihan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat. 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.

1	2	3
		3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya.
	3. Pemberdayaan Perempuan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

1	2	3
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 3. Monitoring evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

1	2	3
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan.
	3. Fasilitasi Pemanfataan Lahan dan Pesisir Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan. 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelengaraan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan.
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 3. Monitoring, evaluasi ,dan pelaporan penyelengaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna. 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna.
	6. Pemasyarakatan dan Kerja sama Teknologi Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerja sama teknologi perdesaan. 2. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerja sama teknologi perdesaan. 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemasyarakatan dan kerja sama teknologi perdesaan.